

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan suatu Negara, terutama Indonesia dalam kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi sebagian besar sektor perekonomian di Indonesia yang dalam pembenahan tersebut membutuhkan dana yang besar. Penerimaan luar negeri berupa ekspor dan penerimaan dalam negeri berupa penerimaan pajak sangat penting mengingat salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgetair, yaitu pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan kedua sektor tersebut diharapkan dapat tercapai fundamental ekonomi yang kuat yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan Negara.

Salah satu sumber dana pembiayaan yang menjadi andalan utama pemerintahan adalah sektor penerimaan pajak. Berikut ini adalah data penerimaan pajak selama 2 tahun terakhir:

Penerimaan Pajak Penghasilan

No	Jenis Pajak	Realisasi 2016	APBN-P 2017	Target % 2016-2017	Realisasi s.d 31 Desember					
					2016	2017	2015-2016 (%)	2016-2017 (%)	Penc. 2016(%)	Penc. 2017 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	PPH Non Migas	630.113,83	742.200,00	17,79	630.113,83	596.582,30	14,02	(5,32)	76,89	80,38
	1. PPh Ps 21	109.644,00	148.054,69	35,03	109.644,00	117.764,73	(4,22)	7,41	84,77	79,54
	2. PPh Ps 22	11.351,86	11.064,85	(2,53)	11.351,86	16.270,42	33,90	43,33	115,82	147,05
	3. PPh Ps 22 Impor	37.977,71	52.543,76	38,53	37.977,71	43.157,39	(5,67)	13,64	87,26	82,14

	4. PPh Ps 23	29.142,39	36.389,83	24,87	29.142,39	34.006,42	4,52	16,69	92,50	93,45
	5. PPh Ps 25/29 OP	5.313,79	19.936,63	275,19	5.313,79	7.806,58	(35,66)	46,91	18,45	39,16
	6. PPh Ps 25/29 Badan	171.596,73	242.663,59	41,42	171.596,73	208.253,14	(7,35)	21,36	45,62	85,82
	7. PPh Ps 26	43.233,04	55.118,10	27,49	43.233,04	50.921,55	(10,35)	17,78	79,34	92,39
	8. PPh Final	117.679,21	156.183,66	32,72	117.679,21	106.317,38	(1,66)	(9,65)	80,77	68,07
	9. PPh Non Migas Lainnya	104.175,06	20.244,89	(80,57)	104.175,06	12.084,69	54.923,50	(88,40)	49.131,78	59,69
B	PPN dan PPnBM	412.213,45	475.483,49	15,35	412.213,45	480.721,05	(2,71)	16,62	86,92	101,10
	1. PPN Dalam Negeri	273.004,75	328.071,07	20,17	273.004,75	314.340,04	(2,50)	15,14	85,74	95,81
	2. PPN Impor	122.774,74	132.355,79	7,80	122.774,74	149.034,03	(5,65)	21,39	87,28	112,60
	3. PPnBM Dalam Negeri	11.810,23	10.642,60	(9,89)	11.810,23	13.292,54	27,09	12,55	112,47	124,90
	4. PPnBM Impor	4.295,39	4.077,04	(5,08)	4.295,39	3.796,35	7,16	(11,62)	99,13	93,12
	5. PPN/PPnB M Impor	328,34	336,99	2,63	328,34	258,09	19,30	(21,40)	98,75	76,59

Sumber: LAKIN 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui realisasi penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi tahun anggaran 2017 mencapai Rp7,80 triliun atau tumbuh 46,91% dibandingkan realisasi tahun anggaran 2016. Walaupun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi masih belum mencapai target yang diinginkan. Kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam mendanai penerimaan pajak yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Bagi pemerintah, pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak di pemerintahan. Kecenderungan melakukan

penghindaran oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment* yaitu Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Hal inilah yang menyebabkan Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan rendahnya penerimaan pajak.

Dalam pelaporan pajak saat ini kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Ada Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang mengabaikan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa terpaksa untuk membayar pajak sehingga mereka tidak memiliki kesadaran yang timbul dari diri sendiri.

Untuk dapat mengidentifikasi adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakannya dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak dan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, selain itu dapat dilihat dari penyeteroran kembali surat pemberitahuan. Banyaknya Wajib Pajak yang melanggar kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu, sehingga banyak menimbulkan isu ketidak patuhan Wajib Pajak dalam perpajakan. Isu tersebut menjadi penting karena dapat menimbulkan upaya Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat terjadi pengurangan

penyetoran dana pajak ke kas negara. Tingkat jumlah Wajib Pajak sangat mempengaruhi pendapatan pajak yang akan di terima oleh negara, karena semakin banyak jumlah Wajib Pajak maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Seperti halnya jumlah Wajib Pajak, semakin banyaknya jumlah surat setoran pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU”**

B. Perumusan Masalah

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2017 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu?
2. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan peningkatan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2017 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu?
3. Apa saja masalah – masalah yang ditemukan dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi serta bagaimana usaha dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peningkatan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2017 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2017 di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.
- c. Untuk mengetahui masalah – masalah yang ditemukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi serta usaha yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan, baik penulis maupun pemerhati pajak terutama di dalam menganalisa variabel – variabel yang meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang.

b. Bagi Fakultas

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa, dosen, dan pihak lain yang membutuhkannya.

c. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakan setiap kebijakan / peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.